

Analisis Kebijakan Politik Studi Tentang Program Prioritas Christian Widodo Dan Serena Francis Dalam 100 Hari Kerja Periode 2024-2029

Wiem Mart Matias Nalle¹, Syahrin B Kamahi², Philips Y N Ndoda³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: wiemnalle@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.70292/pctif.v4i2.145>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 9 September 2026

Revised: 12 September 2026

Accepted: 16 September 2026

Kata Kunci:

dinamika politik,
kebijakan publik,
program prioritas, 100
hari kerja, Multiple
Streams Framework.

Keywords:

political dynamics,
public policy, priority
programs, first 100 days
of governance, Multiple
Streams Framework.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik kebijakan dalam penetapan program prioritas 100 hari kerja pasangan Christian Widodo dan Serena Francis. Fokus penelitian diarahkan pada proses politik yang melatarbelakangi penyusunan dan penetapan program prioritas sebagai strategi awal pemerintahan dalam membangun legitimasi, memperoleh kepercayaan masyarakat, dan mengelola ekspektasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Teori Kerangka Arus Berganda (Multiple Streams Framework) dari John W. Kingdon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan program prioritas tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh dinamika politik yang melibatkan berbagai aktor, seperti kepala daerah, dan DPRD. Kepala daerah memiliki peran dominan dalam menentukan prioritas kebijakan, sementara birokrasi lebih berfungsi sebagai pelaksana teknis. Program prioritas yang ditetapkan umumnya merupakan turunan dari janji kampanye, berorientasi pada pencapaian quick wins, serta dimanfaatkan sebagai strategi untuk membangun legitimasi dan citra politik pada awal masa pemerintahan. Berdasarkan analisis Teori Kerangka Arus Berganda, arus politik menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi penetapan kebijakan, sedangkan arus masalah dan arus kebijakan cenderung mengikuti kepentingan politik yang berkembang. Momentum 100 hari kerja menjadi policy window yang dimanfaatkan pemerintah untuk menetapkan agenda kebijakan secara strategis.

This study aims to analyze the political dynamics underlying the formulation of the 100-day priority programs of Christian Widodo and Serena Francis. The research focuses on the political processes involved in determining these priority programs as an initial governmental strategy to build legitimacy, gain public trust, and manage public expectations. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using John W. Kingdon's Multiple Streams Framework. The findings reveal that the formulation of priority programs is not merely an administrative process but is strongly influenced by political dynamics involving various actors, including the regional head, and the Regional House of Representatives (DPRD). The regional head plays the dominant role in determining policy priorities, while the bureaucracy mainly serves as the technical implementer. The selected priority programs are generally derived from campaign promises, designed to achieve quick wins, and utilized as political instruments to strengthen legitimacy and shape the government's public image during the early stage of leadership. Based on the Multiple Streams Framework, the political stream emerged as the most influential factor in the policy-making process, while the problem stream and policy stream tended to follow prevailing political interests. Furthermore, the first 100 days of governance functioned as a policy window that enabled political actors to strategically establish the government's policy agenda.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu politik, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh proses elektoral dan perolehan mandat politik, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat (public trust) setelah memperoleh kekuasaan. Legitimasi menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan memperoleh penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, periode awal pemerintahan menjadi momentum strategis bagi pemimpin baru untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan, arah kebijakan, serta komitmen terhadap persoalan yang dianggap penting oleh masyarakat. Salah satu instrumen yang umum digunakan pemimpin baru untuk menunjukkan arah kepemimpinannya adalah program 100 hari kerja. Program tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai rangkaian agenda pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk membangun citra, memperkuat legitimasi, dan mengelola ekspektasi masyarakat. Dalam perspektif politik, penetapan program prioritas berkaitan dengan proses agenda setting, yaitu proses ketika pemerintah menentukan isu tertentu sebagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Pemilihan isu yang memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi strategi untuk membangun persepsi bahwa pemerintah bersifat responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam konteks pemerintahan Christian Widodo dan Serena Francis, program prioritas pada periode awal kepemimpinan diarahkan pada sejumlah persoalan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, di antaranya penanganan sampah, pembenahan birokrasi, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketiga isu tersebut memiliki dimensi politik yang penting karena berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penetapan ketiga bidang tersebut sebagai prioritas dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk membangun legitimasi melalui kebijakan yang memiliki dampak dan makna sosial bagi masyarakat. Penanganan sampah, misalnya, merupakan isu yang mudah diamati oleh masyarakat dan berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan serta ruang publik. Dalam konteks legitimasi berbasis kinerja (performance legitimacy), persoalan yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung menjadi penting dalam membentuk penilaian masyarakat terhadap kapasitas pemerintah. Ketika pemerintah menjadikan persoalan sampah sebagai agenda awal, kebijakan tersebut tidak hanya menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi simbol responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, penanganan sampah memiliki dimensi politik sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa pemerintah mampu merespons persoalan konkret yang dihadapi warga. Selain persoalan lingkungan, pembenahan birokrasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Birokrasi merupakan institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Birokrasi yang efektif, transparan, dan responsif dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan pelayanan yang lamban dan tidak akuntabel berpotensi menimbulkan

ketidakpuasan. Oleh karena itu, agenda pembenahan birokrasi dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi prosedural melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (state–society relations). Sementara itu, penguatan UMKM memiliki dimensi politik yang berkaitan dengan legitimasi ekonomi. UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu sektor yang dekat dengan kehidupan kelompok masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap UMKM melalui penguatan kapasitas usaha, akses permodalan, pelatihan, pemasaran, maupun pengembangan ekosistem usaha dapat menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi masyarakat. Dalam konteks politik lokal, kebijakan yang menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat juga dapat menjadi sarana untuk memperluas dukungan sekaligus memperkuat persepsi bahwa pemerintah memiliki orientasi kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Program prioritas dalam 100 hari kerja dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pemerintahan baru. Pemimpin yang baru memperoleh mandat politik perlu membangun konsolidasi pemerintahan, mengarahkan birokrasi, mengelola berbagai kepentingan, serta menerjemahkan janji politik ke dalam agenda pemerintahan. Proses tersebut melibatkan interaksi antara kepentingan politik, kebutuhan masyarakat, kapasitas birokrasi, serta tuntutan untuk menunjukkan hasil awal kepemimpinan. Dengan demikian, penyusunan program 100 hari kerja merupakan proses politik yang mencerminkan bagaimana pemerintah memilih dan menetapkan persoalan tertentu sebagai agenda prioritas. Dalam perspektif tersebut, program 100 hari kerja Christian Widodo dan Serena Francis dapat dilihat melalui tiga dimensi legitimasi, yaitu legitimasi performatif melalui agenda penanganan sampah, legitimasi prosedural melalui pembenahan birokrasi, dan legitimasi ekonomi melalui penguatan UMKM. Ketiga agenda tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun hubungan politik dengan masyarakat melalui isu yang memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Namun, yang menjadi penting dalam penelitian ini bukanlah mengukur keberhasilan teknis pelaksanaan program, melainkan memahami dinamika politik yang melatarbelakangi lahirnya program prioritas tersebut. Dinamika tersebut penting dikaji karena agenda awal pemerintahan pada dasarnya tidak lahir dalam ruang politik yang kosong. Penetapan program dapat dipengaruhi oleh janji politik selama masa kampanye, tuntutan masyarakat, kepentingan aktor politik, kebutuhan birokrasi, serta upaya pemimpin baru dalam membentuk identitas dan arah kepemimpinannya. Program 100 hari kerja menjadi ruang politik yang memperlihatkan bagaimana berbagai kepentingan tersebut dipertemukan dan diterjemahkan ke dalam agenda pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dinamika politik program 100 hari kerja Christian Widodo dan Serena Francis dalam membangun legitimasi dan public trust masyarakat. Fokus penelitian ditempatkan pada proses politik dalam penetapan program prioritas, khususnya penanganan sampah, pembenahan birokrasi, dan penguatan UMKM, serta bagaimana program tersebut diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi pemerintahan pada fase awal kepemimpinan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman mengenai hubungan antara dinamika politik, pembentukan agenda kebijakan, dan strategi pembangunan legitimasi dalam pemerintahan lokal.

Penelitian pertama Lailly Mufidah (2020) melalui penelitian mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui Program Petani Mandiri (PPM) menganalisis implementasi kebijakan menggunakan model implementasi George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPM merupakan program prioritas pemerintah daerah yang mencakup bantuan modal, pelatihan dan pengembangan usaha tani, jaminan pembelian hasil pertanian, asuransi gagal panen, serta beasiswa bagi keluarga petani. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji program prioritas pemerintah daerah dan melihat kebijakan sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Mufidah menitikberatkan pada implementasi dan dampak program terhadap kesejahteraan petani, sedangkan penelitian ini berfokus pada dimensi politik dalam proses pembentukan dan penetapan program prioritas pada fase awal kepemimpinan, khususnya dalam kerangka 100 hari kerja.

Penelitian kedua Christian W. dan T. Yuwono (2017) dalam penelitian berjudul *Politic Timing: Analisis Politik Kebijakan Sosial (BLT dan BPJS) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004–2014* menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BPJS tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan politik dan politic timing. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap dimensi politik kebijakan dan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan upaya mempertahankan atau membangun legitimasi serta dukungan publik. Perbedaannya terletak pada objek dan momentum penelitian. Penelitian Christian W. dan Yuwono berfokus pada kebijakan sosial pemerintah nasional dalam rentang waktu yang panjang, sedangkan penelitian ini mengkaji program prioritas pemerintahan daerah pada fase awal kepemimpinan melalui momentum 100 hari kerja. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan proses politik pembentukan agenda kebijakan pada periode awal pemerintahan.

Penelitian ketiga Maryana, Supena, dan Suwarlan (2022) meneliti implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman petugas terhadap standar operasional prosedur, keterbatasan anggaran, lemahnya komunikasi antarinstansi, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena penanganan sampah menjadi salah satu isu yang ditempatkan sebagai program prioritas dalam 100 hari kerja. Namun, terdapat perbedaan pada fokus analisis. Penelitian Maryana, Supena, dan Suwarlan menitikberatkan pada aspek implementasi teknis dan kelembagaan kebijakan pengelolaan sampah, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran

efektivitas implementasi, tetapi menganalisis posisi penanganan sampah sebagai agenda politik pemerintah dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian keempat Sulistyو Budi Utomo, Yenik Pujowati, dan Eva Yuniarti Utami (2024) melalui penelitian mengenai kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan terhadap pertumbuhan bisnis komunitas UMKM di Jawa Timur menganalisis hubungan antara kebijakan pemerintah dan perkembangan UMKM menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap UMKM sebagai salah satu sektor yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah dan memiliki dimensi sosial-ekonomi bagi masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan tujuan analisis. Penelitian Utomo, Pujowati, dan Utami berorientasi pada pengukuran hubungan dan pengaruh kebijakan terhadap pertumbuhan bisnis UMKM, sedangkan penelitian ini melihat penguatan UMKM sebagai bagian dari agenda politik pemerintahan baru dan sebagai instrumen untuk membangun legitimasi ekonomi serta kepercayaan publik.

Peelitian kelima Yuliana (2022) dalam bukunya Kebijakan Publik Responsif: Pendekatan Partisipatif dalam Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam proses kebijakan publik. Dengan merujuk pada gagasan collaborative governance Ansell dan Gash (2007), pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dipandang dapat meningkatkan efektivitas sekaligus legitimasi kebijakan. Kajian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan hubungan pemerintah dan masyarakat sebagai aspek penting dalam pembentukan legitimasi kebijakan. Perbedaannya, Yuliana lebih menekankan pendekatan konseptual mengenai kebijakan publik yang responsif dan partisipatif, sedangkan penelitian ini mengkaji secara empiris dinamika politik dalam penetapan program prioritas pemerintahan baru serta keterkaitannya dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa kajian terdahulu tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai kebijakan publik umumnya telah banyak membahas aspek implementasi, efektivitas, dampak sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat, dan strategi politik dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, masih terdapat ruang kajian mengenai bagaimana program 100 hari kerja digunakan sebagai momentum politik dalam pembentukan agenda kebijakan pemerintahan baru, khususnya pada konteks pemerintahan lokal. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan kebijakan pada tahap implementasi atau mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sementara penelitian ini menempatkan perhatian pada proses politik di balik penetapan program prioritas. Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada upaya menganalisis program 100 hari kerja bukan semata-mata sebagai instrumen administratif pemerintahan, tetapi sebagai agenda politik pada fase awal kepemimpinan. Penelitian ini secara khusus melihat bagaimana isu penanganan sampah, pembenahan birokrasi, dan penguatan UMKM dipilih sebagai program prioritas serta bagaimana pilihan tersebut berkaitan dengan upaya

membangun legitimasi dan public trust. Perspektif tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu sekaligus menunjukkan kontribusinya dalam kajian politik kebijakan pada tingkat pemerintahan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Proses Penetapan Program Prioritas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan program prioritas 100 hari kerja Christian Widodo dan Serena Francis merupakan proses politik yang tidak semata-mata bersifat administratif. Program prioritas disusun dengan mengacu pada visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat pada masa kampanye, kemudian disesuaikan dengan kondisi daerah, kebutuhan masyarakat, serta masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian, program 100 hari kerja menjadi instrumen awal untuk menerjemahkan komitmen politik ke dalam agenda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh informan dari pihak pemerintah:

“Program 100 hari itu memang disusun dari visi-misi kami waktu kampanye, tapi tentu juga kami sesuaikan dengan kondisi daerah dan masukan dari berbagai pihak.”

(Wawancara dengan Staff Walikota, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan antara janji politik pada masa kampanye dengan agenda pemerintahan setelah memperoleh mandat. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara kaku karena pemerintah juga mempertimbangkan kondisi aktual dan masukan dari berbagai pihak. Artinya, program prioritas merupakan hasil proses penyesuaian antara komitmen politik dengan kebutuhan pemerintahan. Dari perspektif Sekretariat DPRD, program 100 hari kerja juga dipandang memiliki dimensi politik dalam membangun citra kinerja pemerintahan. Informan menyatakan:

“Kami melihat bahwa program yang ditetapkan itu bukan hanya soal kebutuhan masyarakat, tapi juga ada pertimbangan untuk menunjukkan kinerja awal pemerintah.”

(Wawancara dengan Kabag di Sekretariat DPRD, 2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa program prioritas memiliki fungsi simbolik dan politik. Selain diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, program juga menjadi sarana bagi pemerintahan baru untuk menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya. Hal ini diperkuat oleh pandangan akademisi yang melihat program 100 hari sebagai bagian dari strategi membangun legitimasi awal:

“Dalam konteks pemerintahan baru, penetapan program 100 hari itu biasanya lebih bersifat politis, karena digunakan untuk membangun legitimasi awal.”

(Wawancara dengan Akademisi, 2026).

Program 100 hari juga memiliki dimensi komunikasi politik karena menjadi sarana pemerintah menyampaikan arah kerja kepada masyarakat. Informan dari media menjelaskan:

“Program 100 hari ini selalu menjadi perhatian publik karena di situ pemerintah ingin menunjukkan arah kerjanya ke depan.” (Wawancara dengan Media, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program prioritas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja internal pemerintah, tetapi juga sebagai pesan politik kepada publik. Oleh karena itu, pemilihan program yang memiliki tingkat visibilitas tinggi menjadi penting untuk membangun persepsi mengenai responsivitas dan kapasitas pemerintahan baru. Di sisi lain, masyarakat memberikan penekanan pada kesesuaian program dengan kebutuhan nyata. Salah satu informan menyampaikan:

“Kami berharap program 100 hari itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kami, bukan hanya janji saja.” (Wawancara dengan Masyarakat, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ekspektasi publik agar program yang ditetapkan tidak berhenti sebagai janji politik, tetapi benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah yang berupaya membangun legitimasi dan masyarakat yang menuntut responsivitas. Dalam prosesnya, penyusunan program diawali dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam agenda awal pemerintahan dengan mempertimbangkan kelayakan program dan kondisi daerah. Staff Walikota menjelaskan:

“Program awal memang kita ambil dari visi dan misi saat kampanye, karena itu sudah menjadi komitmen politik kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Staff Walikota, 2026).

Selanjutnya, terdapat proses seleksi terhadap program yang akan ditempatkan sebagai prioritas. Meskipun terdapat pertimbangan teknis, proses seleksi tidak sepenuhnya terlepas dari pertimbangan politik. Informan dari Sekretariat DPRD menyatakan:

“Kami melihat ada tahapan seleksi program yang cukup ketat, tapi tetap ada pertimbangan politis dalam menentukan mana yang diprioritaskan.”

(Wawancara dengan Kabag di Sekretariat DPRD, 2026).

Birokrasi daerah dalam proses tersebut berperan memberikan masukan berkaitan dengan aspek teknis, sumber daya, dan kelayakan pelaksanaan program. Namun, posisi birokrasi lebih dominan sebagai pemberi rekomendasi, sedangkan kewenangan penetapan akhir tetap berada pada kepala daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan program memiliki pola yang cenderung top-down, meskipun tetap terdapat ruang konsultasi dan pemberian masukan dari aktor lain. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penetapan program prioritas 100 hari kerja merupakan proses yang mempertemukan aspek politik, teknokratis, dan tuntutan masyarakat. Visi dan misi menjadi dasar normatif, kondisi daerah menjadi pertimbangan substantif, sementara kepentingan politik dan kebutuhan membangun legitimasi turut memengaruhi proses penentuan prioritas.

Aktor dalam Penetapan Program Prioritas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala daerah menjadi aktor paling dominan karena memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan dan mengambil keputusan akhir. Meskipun

demikian, proses penetapan tidak sepenuhnya dilakukan secara individual karena melibatkan DPRD, birokrasi, akademisi, media, serta masyarakat dalam bentuk pemberian masukan dan pertimbangan. Kedudukan kepala daerah sebagai aktor utama terlihat dari keterangan informan di lingkungan DPRD: *“Keputusan akhir tetap ada di kepala daerah, karena beliau yang punya kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan.”* (Wawancara dengan Kabag Risalah DPRD, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa struktur pengambilan keputusan dalam penetapan program cenderung terpusat pada kepala daerah. Kepala daerah memiliki posisi strategis untuk menentukan isu mana yang akan ditempatkan sebagai agenda prioritas dan program mana yang akan didorong pada periode awal pemerintahan. Selain kepala daerah, DPRD memiliki posisi sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan terhadap program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Interaksi tersebut menunjukkan adanya proses komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, meskipun keputusan final tetap berada pada kepala daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan dari DPRD:

“Kami saling berdiskusi dalam menentukan program, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.” (Wawancara dengan Kabag Risalah DPRD, 2026).

Birokrasi juga memiliki peran dalam proses penetapan, terutama melalui pemberian masukan teknis mengenai kesiapan kelembagaan dan sumber daya. Namun, posisi birokrasi tidak menentukan keputusan politik akhir. Dengan demikian, birokrasi lebih berfungsi sebagai aktor teknokratis yang membantu menerjemahkan agenda politik ke dalam bentuk program yang memungkinkan untuk dijalankan.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut memperlihatkan bahwa penetapan program merupakan arena interaksi kepentingan. Akademisi memandang proses tersebut sebagai bagian dari dinamika politik kebijakan:

“Penetapan program itu sebenarnya arena politik, di mana aktor-aktor berusaha memasukkan kepentingannya masing-masing.” (Wawancara dengan Akademisi, 2026).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa proses kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral. Setiap aktor memiliki kepentingan, perspektif, dan kapasitas pengaruh yang berbeda dalam menentukan agenda pemerintah. Aktor politik memiliki kewenangan formal, birokrasi memiliki kapasitas teknis, sementara masyarakat memiliki kepentingan substantif sebagai kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan program masih relatif terbatas. Informan masyarakat menyatakan: *“Kami menilai peran masyarakat masih minim, yang dominan justru elit politik.”* (Wawancara dengan Masyarakat, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pengaruh antaraktor. Meskipun masyarakat menjadi sasaran utama program, keterlibatannya dalam proses penetapan belum memiliki posisi yang sebanding dengan aktor politik dan birokrasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

proses penetapan program masih lebih banyak berlangsung melalui mekanisme internal pemerintahan dan elite politik. Dengan demikian, aktor dalam penetapan program prioritas dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya. Kepala daerah merupakan aktor utama dengan kewenangan keputusan akhir; DPRD berperan sebagai mitra dan pemberi pertimbangan; birokrasi berperan memberikan masukan teknis; sedangkan akademisi, media, dan masyarakat berperan sebagai aktor yang memberikan perspektif, kritik, serta tekanan sosial. Interaksi antaraktor tersebut membentuk dinamika politik dalam menentukan program yang dianggap paling penting untuk ditempatkan sebagai agenda 100 hari kerja.

Temuan Utama

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga temuan utama mengenai politik penetapan program prioritas Christian Widodo dan Serena Francis dalam 100 hari kerja. Pertama, program prioritas merupakan bentuk penerjemahan visi dan misi kampanye ke dalam agenda pemerintahan awal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara komitmen politik pada masa elektoral dengan agenda kebijakan setelah memperoleh mandat. Kedua, penetapan program tidak hanya didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat dan pertimbangan teknis, tetapi juga memiliki dimensi politik. Program 100 hari kerja digunakan untuk menunjukkan arah kepemimpinan, membangun citra kinerja, serta memperkuat legitimasi awal pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan program memiliki fungsi substantif sekaligus simbolik dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketiga, proses penetapan program melibatkan berbagai aktor, tetapi distribusi pengaruh antaraktor tidak seimbang. Kepala daerah memiliki posisi paling dominan dalam pengambilan keputusan, sementara DPRD dan birokrasi memberikan pertimbangan sesuai dengan fungsi masing-masing. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat masih terbatas sehingga proses penetapan cenderung bersifat top-down. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa program 100 hari kerja merupakan arena politik tempat komitmen kampanye, kebutuhan masyarakat, pertimbangan teknokratis, kepentingan aktor, dan kebutuhan membangun legitimasi bertemu dalam proses pembentukan agenda kebijakan. Dengan demikian, program prioritas tidak dapat dipahami hanya sebagai daftar kegiatan awal pemerintahan, tetapi sebagai produk dari proses politik dalam menentukan persoalan yang dianggap penting dan layak mendapatkan perhatian pemerintah.

Dasar Pertimbangan Penetapan Program Prioritas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan program prioritas dalam 100 hari kerja Christian Widodo dan Serena Francis didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang saling berkaitan, yaitu komitmen terhadap janji kampanye, kondisi dan permasalahan daerah, kepentingan politik, kebutuhan untuk menghasilkan capaian awal (quick wins), serta pertimbangan komunikasi kepada masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan program tidak sepenuhnya bersifat teknokratis, tetapi merupakan proses yang mempertemukan kebutuhan kebijakan dengan pertimbangan politik. Salah satu pertimbangan utama adalah keberlanjutan komitmen politik yang telah disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye. Staff Walikota menjelaskan:

“Kami berusaha menjalankan program masalah yang sudah meledak di Kota Kupang.”

(Wawancara dengan Staff Walikota, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya merespons persoalan yang dianggap telah memiliki tingkat urgensi dan perhatian publik yang tinggi. Namun, pelaksanaan komitmen kampanye tidak dilakukan secara keseluruhan tanpa proses seleksi. Kompleksitas persoalan Kota Kupang membuat pemerintah harus menentukan persoalan yang dianggap paling mendesak dan memungkinkan untuk ditangani pada fase awal pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan oleh akademisi: *“Janji kampanye itu penting, tapi Kota Kupang kota yang kompleks dengan berbagai masalah sehingga ada pertimbangan beberapa faktor untuk selektif.”*

Temuan tersebut memperlihatkan adanya proses seleksi dalam menerjemahkan janji politik menjadi agenda kebijakan. Artinya, tidak seluruh persoalan dan janji politik dapat ditempatkan dalam posisi yang sama sebagai prioritas. Pemerintah perlu menentukan isu yang dianggap memiliki urgensi, relevansi dengan kondisi daerah, serta peluang untuk diwujudkan dalam periode awal pemerintahan. Selain kebutuhan masyarakat, pertimbangan politik juga menjadi bagian dalam menentukan prioritas. Informan dari Sekretariat DPRD menyatakan:

“Program yang dipilih biasanya yang bisa menjaga stabilitas politik di awal pemerintahan.”

(Wawancara dengan Kabag Sekretariat DPRD, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program prioritas memiliki fungsi politik selain fungsi kebijakan. Pada fase awal pemerintahan, stabilitas politik menjadi penting karena pemerintah sedang membangun posisi dan konsolidasi kekuasaan. Program yang dipilih dapat menjadi instrumen untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat sekaligus menjaga dukungan politik. Pertimbangan lainnya adalah kemampuan program untuk menghasilkan capaian yang relatif cepat dan dapat diamati masyarakat. Salah satu informan menjelaskan:

“Program 100 hari itu harus yang cepat terlihat hasilnya, supaya masyarakat bisa langsung menilai.”

(Wawancara dengan Informan Penelitian, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip quick wins menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program. Program yang hasilnya mudah diamati memiliki nilai strategis karena memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan sejak awal masa kepemimpinan. Dengan demikian, aspek visibilitas menjadi bagian dari pertimbangan politik dalam pemilihan program. Selain itu, terdapat pula pertimbangan mengenai aspek simbolik dan komunikasi politik. Akademisi menyatakan: *“Saya melihat program yang dipilih setelah melalui beberapa pertimbangan.”* (Wawancara dengan Akademisi, 2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemilihan program tidak hanya mempertimbangkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, tetapi juga bagaimana program tersebut dipersepsikan oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan baru, program prioritas dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai karakter dan orientasi kepemimpinan.

Namun, dari perspektif masyarakat, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa mudah program tersebut dilihat, tetapi dari kesesuaiannya dengan kebutuhan warga. Salah satu informan masyarakat menyampaikan: *“Yang penting programnya sesuai kebutuhan kami, bukan hanya untuk dilihat saja.”* (Wawancara dengan Masyarakat, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat agar program prioritas memiliki orientasi substantif dan tidak semata-mata digunakan sebagai instrumen pencitraan. Dengan demikian, terdapat perbedaan perspektif antara kebutuhan pemerintah untuk menunjukkan capaian awal dengan harapan masyarakat agar program benar-benar menjawab persoalan yang mereka hadapi. Berdasarkan temuan tersebut, dasar pertimbangan penetapan program prioritas dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebutuhan publik, komitmen politik, pertimbangan kelayakan, stabilitas politik, dan strategi komunikasi pemerintahan. Program 100 hari kerja dengan demikian bukan sekadar daftar kegiatan administratif, tetapi merupakan pilihan politik yang mencerminkan isu mana yang dianggap penting, mendesak, dan strategis untuk ditampilkan pada awal masa pemerintahan.

Pembahasan dan Analisis

Penetapan Program Prioritas dalam Perspektif Multiple Streams Framework

Analisis penelitian ini menggunakan Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh John W. Kingdon (1984). Kerangka ini menjelaskan bahwa agenda dan keputusan kebijakan terbentuk melalui pertemuan tiga arus, yaitu problem stream, policy stream, dan politics stream. Ketiga arus tersebut pada kondisi tertentu dapat bertemu dalam sebuah policy window, yaitu momentum yang membuka peluang bagi suatu isu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Dalam proses tersebut, policy entrepreneur memiliki peran dalam menghubungkan ketiga arus dan memanfaatkan momentum yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, program prioritas 100 hari kerja Christian Widodo dan Serena Francis dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara persoalan publik yang dianggap mendesak, alternatif program yang tersedia, dan kondisi politik pada awal masa pemerintahan. Ketiga unsur tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dalam proses pembentukan agenda kebijakan.

Problem Stream: Pengakuan terhadap Persoalan Publik

Pengakuan terhadap Persoalan Publik Dalam Multiple Streams Framework, problem stream berkaitan dengan proses ketika kondisi tertentu dipahami sebagai masalah publik yang membutuhkan intervensi pemerintah. Tidak semua kondisi sosial secara otomatis menjadi agenda pemerintah. Suatu persoalan perlu memperoleh perhatian dan didefinisikan sebagai masalah yang mendesak untuk memperoleh respons kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Christian Widodo dan Serena Francis mengidentifikasi sejumlah persoalan yang memiliki tingkat perhatian publik tinggi sebagai dasar penetapan program prioritas. Pernyataan Staff Walikota mengenai upaya menjalankan program yang berkaitan dengan “masalah yang sudah meledak di Kota Kupang” menunjukkan adanya proses pengenalan terhadap persoalan yang dianggap mendesak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa

problem stream dalam penelitian ini berkaitan dengan persoalan yang telah memperoleh perhatian masyarakat dan pemerintah. Namun, tidak seluruh persoalan ditempatkan sebagai prioritas. Kompleksitas persoalan Kota Kupang menyebabkan adanya proses seleksi terhadap isu yang akan dimasukkan ke dalam agenda 100 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan masalah tidak semata-mata didasarkan pada besarnya persoalan, tetapi juga pada tingkat perhatian publik, urgensi politik, serta kemungkinan persoalan tersebut direspons dalam periode awal pemerintahan. Dengan demikian, problem stream dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa masalah publik menjadi titik awal pembentukan agenda, tetapi proses seleksi tetap diperlukan untuk menentukan masalah mana yang dianggap strategis untuk masuk ke dalam program prioritas.

Policy Stream: Alternatif dan Pilihan Kebijakan

Policy stream dalam kerangka Kingdon berkaitan dengan ketersediaan berbagai alternatif atau solusi kebijakan untuk merespons masalah yang telah diidentifikasi. Alternatif tersebut kemudian mengalami proses seleksi berdasarkan kelayakan, sumber daya, penerimaan politik, serta kemungkinan untuk diterapkan. Dalam penelitian ini, alternatif program berasal dari visi dan misi kepala daerah, janji kampanye, masukan birokrasi, serta pertimbangan terhadap kondisi daerah. Program yang akhirnya dipilih tidak hanya mempertimbangkan substansi persoalan, tetapi juga kemampuan pemerintah untuk menunjukkan capaian dalam waktu relatif singkat. Temuan mengenai orientasi quick wins menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang memiliki hasil cepat dan mudah diamati memperoleh nilai strategis lebih tinggi. Pernyataan informan bahwa program 100 hari “harus yang cepat terlihat hasilnya” memperlihatkan bahwa kelayakan suatu program tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan capaian yang dapat dikenali masyarakat. Dengan demikian, policy stream dalam penelitian ini memperlihatkan adanya pertemuan antara pertimbangan teknis dan pertimbangan politik. Alternatif program harus memiliki peluang untuk dijalankan, tetapi sekaligus memiliki nilai strategis dalam menunjukkan arah dan kapasitas pemerintahan baru.

Politics Stream: Konteks Politik Pemerintahan Baru

Konteks Politik Pemerintahan Baru Politics stream berkaitan dengan kondisi politik yang memengaruhi proses pembentukan agenda kebijakan, termasuk perubahan pemerintahan, tekanan kelompok kepentingan, dukungan politik, serta persepsi dan ekspektasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode awal pemerintahan Christian Widodo dan Serena Francis memiliki kondisi politik yang mendorong kebutuhan untuk segera menunjukkan arah kepemimpinan. Program 100 hari kerja menjadi salah satu sarana untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan baru mampu menerjemahkan mandat politik ke dalam agenda konkret. Hal tersebut tercermin dari pernyataan informan Sekretariat DPRD bahwa program yang dipilih juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas politik pada awal pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penetapan program tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah untuk membangun konsolidasi dan memperoleh penerimaan politik. Selain itu, tingginya ekspektasi masyarakat juga menjadi bagian dari konteks politik tersebut.

Masyarakat tidak hanya menunggu pelaksanaan program, tetapi juga menjadikan program awal sebagai dasar untuk menilai keseriusan dan arah pemerintahan. Oleh karena itu, politics stream dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan elite dan institusi politik, tetapi juga dengan ekspektasi publik terhadap pemerintahan baru.

Policy Window: Momentum 100 Hari Kerja

Dalam kerangka Kingdon, policy window merupakan momentum ketika ketiga arus kebijakan memiliki peluang untuk bertemu sehingga memungkinkan suatu isu masuk ke dalam agenda dan menghasilkan keputusan kebijakan. Dalam penelitian ini, periode 100 hari kerja menjadi momentum yang strategis karena pemerintahan baru berada pada fase awal pembentukan arah kebijakan. Pada momentum tersebut, terdapat persoalan publik yang telah diidentifikasi, alternatif program yang bersumber dari visi dan misi serta masukan berbagai aktor, dan kondisi politik yang mendorong pemerintah untuk segera menunjukkan kinerja. Pertemuan ketiga unsur tersebut menciptakan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan sejumlah program sebagai prioritas. Dengan demikian, 100 hari kerja tidak hanya memiliki makna temporal sebagai batas waktu awal pemerintahan, tetapi juga memiliki makna politik sebagai momentum untuk memperkenalkan agenda pemerintahan, menunjukkan respons terhadap persoalan publik, serta membangun persepsi awal masyarakat terhadap kepemimpinan baru.

Policy Entrepreneur: Peran Kepala Daerah

Dalam Multiple Streams Framework, policy entrepreneur merupakan aktor yang berusaha menghubungkan berbagai arus dan memanfaatkan policy window untuk mendorong suatu isu menjadi agenda kebijakan. Aktor tersebut tidak hanya memiliki kepentingan terhadap kebijakan, tetapi juga memiliki kemampuan, posisi, dan sumber daya untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, kepala daerah memiliki posisi sentral dalam proses tersebut karena keputusan akhir mengenai arah dan prioritas kebijakan berada pada kewenangannya. Kepala daerah menerima berbagai masukan dari birokrasi, DPRD, masyarakat, serta aktor lainnya, kemudian menentukan program yang dianggap sesuai dengan arah pemerintahan. Dalam konteks ini, Christian Widodo dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki posisi strategis dalam menghubungkan persoalan publik, pilihan program, dan momentum politik awal pemerintahan. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara individual karena terdapat aktor lain yang memberikan masukan dan memengaruhi pembentukan agenda. Dengan demikian, peran kepala daerah sebagai policy entrepreneur terutama terlihat pada kapasitasnya dalam menentukan prioritas, memanfaatkan momentum awal pemerintahan, serta mengarahkan agenda kebijakan agar sesuai dengan tujuan politik dan pemerintahan.

Program 100 Hari Kerja dan Public Trust

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program 100 hari kerja memiliki hubungan dengan upaya membangun public trust. Masyarakat menjadikan program awal sebagai salah satu indikator untuk melihat keseriusan, responsivitas, dan arah pemerintahan baru. Program yang memiliki tingkat visibilitas tinggi, seperti penanganan persoalan yang dirasakan langsung masyarakat, memiliki nilai strategis dalam

membentuk persepsi publik. Pemerintah dapat menggunakan capaian awal tersebut untuk menunjukkan bahwa mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan telah diterjemahkan ke dalam tindakan pemerintahan. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya dibangun melalui program yang mudah terlihat. Masyarakat mengharapkan agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, public trust tidak cukup dibangun melalui visibilitas program, tetapi juga melalui kesesuaian antara agenda pemerintah dan kebutuhan substantif masyarakat. Dalam konteks tersebut, program 100 hari kerja dapat dipahami sebagai tahap awal pembentukan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi proses yang dibangun melalui kesesuaian antara komitmen politik, agenda kebijakan, dan respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat.

Dinamika Politik dalam Penetapan Program Prioritas

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penetapan program prioritas 100 hari kerja merupakan proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Kepala daerah memiliki kewenangan paling besar dalam menentukan keputusan akhir, sedangkan DPRD, birokrasi, akademisi, media, dan masyarakat memberikan pertimbangan dari perspektif yang berbeda. Dinamika tersebut memperlihatkan adanya proses seleksi terhadap persoalan dan alternatif kebijakan. Persoalan yang memiliki perhatian publik tinggi lebih mudah masuk ke dalam agenda, sementara alternatif program dipertimbangkan berdasarkan kelayakan dan potensi menghasilkan capaian awal. Pada saat yang sama, kondisi politik pemerintahan baru menciptakan dorongan untuk segera menunjukkan kinerja. Jika dibaca melalui Multiple Streams Framework, dinamika tersebut menunjukkan adanya hubungan antara problem stream, policy stream, dan politics stream. Ketiga arus tersebut memperoleh momentum pada periode 100 hari kerja sebagai policy window. Kepala daerah kemudian memainkan peran strategis dalam menghubungkan berbagai arus tersebut melalui proses penentuan prioritas. Dengan demikian, program 100 hari kerja Christian Widodo dan Serena Francis tidak hanya dapat dipahami sebagai agenda administratif awal pemerintahan. Program tersebut merupakan hasil dari proses politik dalam menentukan persoalan yang dianggap penting, memilih alternatif respons kebijakan, serta memanfaatkan momentum awal kepemimpinan untuk membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pembentukan agenda kebijakan pada fase awal pemerintahan merupakan proses yang mempertemukan pertimbangan substantif, teknokratis, dan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Politik Kebijakan Program Prioritas dalam 100 Hari Kerja pasangan Christian Widodo dan Serena Francis, yang difokuskan pada tahap penetapan program prioritas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan program prioritas merupakan proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik. Meskipun secara formal proses ini mengikuti mekanisme perencanaan yang berbasis visi dan misi kepala daerah, namun dalam praktiknya penetapan program merupakan hasil dari interaksi berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik dari aktor-aktor yang terlibat.

2. Aktor politik memiliki peran yang dominan dalam proses penetapan program prioritas. Kepala daerah sebagai aktor utama memiliki kewenangan penuh dalam menentukan program yang diprioritaskan, sementara aktor lain seperti tim sukses, partai politik, dan DPRD turut memberikan pengaruh dalam bentuk aspirasi dan kepentingan politik. Di sisi lain, peran birokrasi cenderung terbatas pada aspek teknis dan administratif, sehingga tidak menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan.

3. Dasar pertimbangan dalam penetapan program prioritas tidak hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga pada kepentingan politik dan strategi pencitraan. Program yang dipilih umumnya merupakan turunan dari janji kampanye, memiliki nilai strategis dalam menjaga dukungan politik, serta berorientasi pada program-program yang bersifat “quick wins” atau mudah ditampilkan kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan bahwa kebijakan awal pemerintahan digunakan sebagai alat untuk membangun legitimasi dan citra politik.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Kerangka Arus Berganda dari John W. Kingdon, penetapan program prioritas merupakan hasil dari pertemuan tiga arus utama, yaitu arus masalah (problem stream), arus kebijakan (policy stream), dan arus politik (politics stream). Dalam penelitian ini, arus politik terlihat sebagai faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan, sementara arus masalah dan arus kebijakan cenderung mengikuti arah kepentingan politik. Momentum 100 hari kerja merupakan “policy window” yang dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menetapkan agenda kebijakan. Pada fase ini, pemerintah memiliki peluang besar untuk menentukan arah kebijakan karena dukungan politik yang masih kuat dan ekspektasi publik yang tinggi. Dalam konteks ini, kepala daerah berperan sebagai policy entrepreneur yang menghubungkan ketiga arus tersebut untuk menghasilkan keputusan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan program prioritas dalam 100 hari kerja bukan hanya merupakan proses teknis perencanaan kebijakan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik untuk membangun legitimasi, mempertahankan kekuasaan, dan membentuk citra pemerintahan di awal masa kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kosaza S, Setiyono B, Wijayanto W. Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. *J Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. 2023;11(1):45–60.
- Prasetyawan E, Masyithah M. *Pengelolaan Sampah: Kebijakan, Implementasi, dan Revisi Undang-Undang*. Jakarta: DPR RI; 2023. Tersedia dari: dokumen resmi DPR RI

- Silahudin S, Lestari S. Reformulasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. *J Soma*. 2023;5(2):88–102.
- Yuliana E. Kebijakan Publik Responsif: Pendekatan Partisipatif dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers; 2022.
- Al Khumairoh ANF, Purnaweni H, Herawati AR. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. *Jo Policy and Management Review*. 2024;13(2):1–19.
- Komarudin A, Rosmajudi A, Hilman A. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education and Humanities*. 2023;3(1):55–67.
- Noviyanti N, Noviani HI, Octaviasari S, Kemalia N, Bargoyah F, Baihaqy PS. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah Induk Surabaya. *Transparansi: J Ilmiah Ilmu Administrasi*. 2023;5(1):22–34.
- Harefa F, Manalu SP, Marsaulina I. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Medan. *Lingkungan dan Kesehatan Kerja*. 2021;3(1):1–7.
- Sunaryo. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah. *Sinamu*. 2020;2(1):1–6.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara; diakses ulang 2023.
- Lailly Mufidah (2020) Analisis kebijakan pemerintah kabupaten bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui program petani mandiri
- E. Christian, W, and T. Yuwono, (2017), *POLITIC TIMING: ANALISIS POLITIK KEBIJAKAN SOSIAL (BLT DAN BPJS) PEMERINTAHAN ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2004-2014*
- Sulistyo Budi Utomo, Yenik Pujowati, Eva Yuniarti Utami (2024) Analisis Kebijakan Pemerintah, Bantuan Modal, dan Pelatihan Kewirausahaan Terhadap Pertumbuhan Bisnis pada Komunitas UMKM di Jawa Timur,